

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait pelaku sistem pembayaran Indonesia menyelenggarakan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*).<sup>1</sup>

*Cash less society* adalah masyarakat yang menerapkan transaksi non tunai. Menurut Ricardus Eko Indrajit, ketua *Organizing Committe Apconex* 2008, ada beberapa alasan mengapa *cash less society* perlu diterapkan,<sup>2</sup> yaitu:

1. Adanya daya saing
2. Mencetak uang tunai membutuhkan biaya yang lebih mahal;
3. Bank tidak hanya sebagai lembaga untuk menyimpan uang tapi juga sebagai sarana bertransaksi;
4. *Tren* global pada saat ini mengarah pada *cash less society*; dan
5. Konvergensi bank dan lembaga keuangan dengan industri lain.

---

<sup>1</sup>GNNT, <http://www.gerakannasionalnontunai.com/>, diakses pada 18 November 2017, Pukul 22:10 WIB.

<sup>2</sup> Biscom, Aponex 2008; Dari *cash* ke *noncash* <http://apcnex2008/2008/coverage.com/>, diakses pada 20 November 2017, Pukul 10:20 WIB.

Menurut Dyah Nastiti, Direktur Akuntansi dan Sistem Pembayaran BI, ada beberapa faktor yang meyakinkan bahwa *cashless society* siap diberlakukan apabila :

1. Masyarakat sebenarnya sudah menggunakan alat pembayaran nontunai misalkan infrastrukturnya tersedia
2. Kalangan perbankan telah menyediakan berbagai *channel* pembayaran non tunai demi kemudahan nasabah; dan
3. Makin banyak institusi non bank tertarik mengembangkan *e-money* dalam rangka menyediakan instrument *micro payment*, misalnya industri telekomunikasi, transportasi dan *ritel*.

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada sektor teknologi saja tapi juga berdampak pada sektor-sektor lain, seperti contohnya yang terjadi pada sektor transportasi. Perkembangan teknologi pada bidang transportasi menimbulkan berbagai kendala yang harus dihadapi dan harus segera dicari penyelesaiannya, salah satunya adalah kemacetan yang terjadi di jalan tol yang seharusnya merupakan jalan bebas hambatan. Fungsi jalan tol sebagai jalan alternatif bagi pengguna keadaan berroda empat atau lebih untuk mempersingkat waktu tempuh dibandingkan dengan melalui jalan non-tol yang mengalami kepadatan kendaraan yang sangat parah.

Kemacetan saat ini yang terjadi di jalan tol timbul karena volume kendaraan yang terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan

pembangunan jalan yang memadai, sehingga menyebabkan ruas jalan *non-tol* menjadi sangat padat. Hal tersebut berimbas pada penumpukkan kendaraan yang ingin menggunakan jalan tol termasuk gerbang atau pintu tol karena proses pembayaran yang harus dilakukan oleh setiap kendaraan yang ingin memasuki jalan tol. Antrian kendaraan yang terlihat pada setiap gerbang atau pintu tol membuat pemerintah mencari cara bagaimana jalan keluar yang terbaik dan dapat mempermudah proses transaksi pembayaran tol bagi para pengguna tol.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Jasa Marga dengan perusahaan tol lainnya mengadakan tender dan PT. Bank Mandiri (Persero) terpilih untuk menjadi mitra dalam meluncurkan layanan transaksi pembayaran non-tunai untuk digunakan di beberapa ruas jalan tol baik di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) maupun di ruas jalan tol lainnya.<sup>3</sup>

Jasa Marga melihat bahwa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Khususnya dalam transaksi pembayaran di gerbang tol, Jasa Marga melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri untuk mengeluarkan produk perbankan berupa kartu pintar (*smart card*) dengan tujuan utama yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi pembayaran tol. Keberadaan *e-Toll Card* bertujuan agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran tol.

---

<sup>3</sup>Aprianiza,Humaerah : <http://Anisisyuridis.com/> Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Pembayaran, diakses pada 20 November 2017, pukul 23.20 WIB.

Kepraktisan tersebut adalah masyarakat tidak lagi harus membayar dengan menggunakan uang tunai, menunggu perhitungan uang kembalian yang diberikan oleh petugas tol.

Tidak semua Produk dan jasa perbankan diatur dengan ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan *e-Toll Card*, produk perbankan tersebut tunduk pada peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*), dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DSAP tentang uang Elektronik (*Elektronic Money*).

Konsep muamalah merupakan konsep yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak manusia merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang terjadi. Konsep muamalah telah diatur dalam Islam dalam bentuk syari'ah yang memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah dan makruh. Di dalam syari'ah terdapat prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk menuruti hawa nafsu dan batasan tersebut ialah fiqh muamalah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet II, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 2.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Abu Hanifah pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitive yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*, bahwa jual beli (*al-bay'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>5</sup>

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya kemungkinan memanipulasi dan menghilangkan kerugian karena factor ketidak tahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal.<sup>6</sup> Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm 101

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hyyie al-kattani et,al, juz 5, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2011), hlm. 34

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asa-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)
2. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-musawah*)
3. Asas Keadilan (*Al- 'Adalah*)
4. Asas Kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)
5. Asas Kejujuran (*Ash-Shidq*)
6. Asas Kemanfaat
7. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*), yang mana dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa: “Uang elektronik (*Elektronik Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapanh Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009/Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

Seiring dengan diberlakukannya penerapan transaksi nontunai di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017, mengacupada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, dimana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2) Undang-undang Mata Uang yang berbunyi :

Pasal 2 ayat (2):

Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.

Pasal 23 ayat (1):

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

Pasal 33 ayat (2):

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>9</sup>

Kebijakan mengenai penggunaan uang elektronik di jalan Tol mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

---

<sup>9</sup>Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang

16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol dimana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Nontunai di jalan tol. Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017.

Pasal 7 bagian ketiga, persyaratan teknis :

1. Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/ atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Teknologi berbasis kartu uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a paling sedikit memenuhi sebagai berikut:
  - a. Memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
  - b. Memiliki mekanisme untukantisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
  - c. Dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
  - d. Mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
  - e. Sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;
  - f. Dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis Teknologi transaksi tol berbasis nirsentuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b harus mendapat persetujuan BPJT dan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki tingkat kehandalan dan akurasi yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
  - b. Data transmisi dan peralatan harus memenuhi standar internasional;
  - c. Memiliki penyimpanan data dengan kapasitas yang memadai;
  - d. Memiliki mekanisme antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
  - e. Dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;



- f. Mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi nontunai pada sektor transportasi lainnya;
  - g. Memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. Memiliki mekanisme pengawasan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemajuan teknologi dan;
  - i. Sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol.
4. Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.<sup>10</sup>

Saat ini terdapat dua bentuk uang elektronik yang beredar di Indonesia yaitu uang elektronik yang menggunakan media *chip* dan juga uang elektronik yang menggunakan media server. Selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik dijelaskan bahwa ada dua jenis uang elektronik, yaitu uang elektronik *registered* dan uang elektronik *unregistered*.

Uang elektronik yang menggunakan media chip biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang tidak terregistrasi, karena tidak terregistrasi sehingga siapapun yang memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang disimpan dalam kartu pun dibatasi hanya satu juta rupiah.

Sedangkan uang elektronik jenis kedua yaitu uang elektronik yang berbasis server, yang biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang terregistrasi karena pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan di data oleh *acquirer* (penerbit

---

<sup>10</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol

uang elektronik). Nominal uang yang dapat disimpan melalui uang elektronik jenis ini biasa mencapai lima juta rupiah. Tetapi pada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor telpon atau akun dan harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya. Dari penggunaan kedua jenis uang elektronik tadi pun berbeda juga nominal dalam pemotongan saldo dalam setiap transaksi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TAHUN 2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DIJALAN TOL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, kebijakan penerapan bayar tol dengan cara nontunai atau dengan menggunakan *e-Toll* maupun *E-Money* mulai diterapkan per 31 Oktober 2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Kebijakan tersebut diwajibkan oleh pemerintah melalui Jasamarga untuk seluruh pengguna jasa layanan jalan tol di Indonesia. Sehingga pada akhirnya melalui kebijakan tersebut dapat memaksa masyarakat pengguna tol untuk wajib beralih menggunakan uang elektronik untuk transaksi nontunai. Dalam penerapan dilapangan kebijakan tersebut muncul berbagai pro dan

kontra mulai dari ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaannya, ancaman PHK pekerja tol, perdebatan skema harga untuk transaksi pengisian ulang (*top-up*) uang elektronik, hingga dasar hukum tentang uang elektronik yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Latar belakang dan alasan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol di hubungkan dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam kaitannya dengan asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil pemaparan pada latar belakang dan munculnya suatu masalah sudah dijelaskan dirumusan masalah, maka penelitian yang dibuat oleh penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan alasan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol dihubungkan dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata uang dalam kaitannya dengan asas kebebasan (*Al-Hurriyah*).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berguna baik untuk pribadi penulis, akademisi dan masyarakat umum. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Kegunaan teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, agar dapat menjadi acuan di bidang pengembangan jasa keuangan maupun sebagai acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya tentang aspek kesyariahan.
2. Kegunaan Praktis, hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengimplementasian produk, pengembangan produk, maupun optimalisasi produk yang tetap memperhatikan prinsip syariah.

## **E. Studi Terdahulu**

Penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat menjadi acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penulisan kajian ini yaitu sebagai berikut;

Asep Saiful Bahri, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2010 dalam skripsinya “Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)” Uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik pada prinsipnya sudah dapat diimplementasikan dalam perbankan syariah, jenis akad yang dapat diimplementasikan dalam produk tersebut menurut akad fiqh muamalah adalah menggunakan akad Sharf sebagai akad utama, dan akad ijarah serta wakalah sebagai akad pendukung dalam hubungannya dengan pedagang maupun pemegang kartu, prinsip-prinsip syariah yang harus ditetapkan dalam uang elektronik adalah tidak boleh mengandung maysir, riba, tidak mendorong israf (pengeluaran berlebihan), dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.

Nur Lailatus Sholihah, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2014 dalam skripsinya “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit”. Dari tinjauan fiqh muamalat melalui studi pada DSN –MUI menyatakan bahwa transaksi penukaran uang berbasis bitcoin belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam Islam. Karena tidak ada benda yang dapat merepresentasikan uang tersebut. Walaupun ini jenis transaksi spot, tetap belum dinyatakan sah juga menurut Islam, karena tidak ada legalitas dari pemerintah, tidak memenuhi persyaratan sebagai matauang baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam kaidah fiqh, serta rentan akan penipuan.

Imam Anendro, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 dalam skripsinya “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Penggunaan E-Money”. Dari hasil uji regresi menjelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, harga, fitur layanan dan promosi terhadap minat nasabah Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta dalam menggunakan *e-money*.

Danang Priyo Aji Wicaksono, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012 dalam skripsinya “Pengaruh Transaksi Pembayaran Menggunakan Kliring, Rtgs, Kartu Kredit,

Atm/Debet Dan Uang Elektronik (*E-money*) Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia”. Transaksi pembayaran menggunakan kliring terhadap permintaan uang kartal di Indonesia tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi pembayaran menggunakan RTGS terhadap permintaan uang kartal di Indonesia tidak berpengaruh dalam jangka pendek, tapi berpengaruh dalam jangka panjang. Transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit terhadap permintaan uang kartal di Indonesia berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi pembayaran menggunakan ATM/debet terhadap permintaan uang kartal di Indonesia berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) terhadap permintaan uang kartal di Indonesia tidak berpengaruh dalam jangka pendek.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tentang ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya<sup>11</sup>. Regulasi dalam transaksi elektronik bukan hanya berdasar dari undang-undang saja akan tetapi, sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Adapun asas-asas hukum perikatan islam sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Undang-undang No 11 tahun 2008<sup>11</sup> Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

### 1. *Asas Illahiah*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.

### 2. *Asas Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini memiliki arti bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas menentukan suatu objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi kemudian hari. Asas *Al-hurriyah* dijelaskan bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian atau akad.

Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal; kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kebebasan beragama dalam islam dijamin berdasarkan prinsip Tidak ada paksaan di dalam beragama (*la'ikra'ha fi'al-di'n*) sebagaimana dinyatakan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 dan al-Kafirun ayat 5 :

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang



amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>12</sup>

Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 5:

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Artinya: “Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.”<sup>13</sup>

Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan (*al-Burha'n wa al-Iqna'*). Ayat 256 Al-Baqarah turun ketika para Sahabat mengusulkan kepada Nabi (pada tahun keempat Hijrah) untuk memaksa anak-anak Bani Nadlir agar memeluk Islam. Akan tetapi, Nabi melarangnya sehingga turunlah ayat tersebut diatas.<sup>14</sup>

### 3. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa parapihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga menentukan suatu kondisi dari satu akad dari setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

---

<sup>12</sup> Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : Departemen Agama RI), hlm. 43

<sup>13</sup> Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 603

<sup>14</sup> Juhaya, S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995), hlm. 76

#### 4. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang seringkali disebutkan dalam al Quran. Bersikap adil seringkali Allah tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada ketakwaan.

#### 5. *Al-Ridha* (Kebenaran dan Kejujuran)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan. Kata “suka sama suka” menunjukan bahwa dalam hal ini membuat perjanjian atau perikatan khususnya dilapang perniagaan harus senantiasa didasarkan asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

#### 6. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/ kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau perikatan. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses perikatan tersebut.

#### 7. *Al-Kitabah* (Tertulis).

Bahwa setiap perikatan hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar aqad yang

dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perikatan hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahdah*), Rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu<sup>15</sup>.

Metode penetapan hukum melalui maqashid al-syariah, yaitu maqashid al-syariah istilah tujuan al-syar'i (Allah Swt, dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan Hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw, yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan persyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya (21) ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>16</sup>

Rahmat dalam ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut:

وَلِمَقْصَدِ الْعَمَلِ لِلشَّرْعِ مِنْ تَشْرِيعِهِ الْأَحْكَامُ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكِفَالَةٍ  
ضُرُورًا، وَتَوْفِيرِ حَاجَاتِهِمْ، وَتَحْسِينِيًّا .

---

<sup>15</sup> Gembala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 30

<sup>16</sup> Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm.331

Artinya: “Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).”

Begitu juga menurut Izzudiin Ibn Abdi Salam bahwa tujuan syariat adalah:

والشرعة كلها مصالح اما تدرا مفا سد او تجلب مصالح

Artinya: “Semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan masalah (kebaikan.)”<sup>17</sup>

Menurut pendapat Yadi Janwari menyatakan bahwa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalah boleh dilakukan apabila sampai ada dalil yang mengharamkan.
2. Muamalah hendaklah suka sama suka (*Anntaradin*).
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan mashlahat, dan menolak mudharat.
4. Muamalah itu harus terhindar dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 333

<sup>18</sup> Yadi, Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm.13

Menurut Ulama fiqh akad perjanjian adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>19</sup>

Dalam pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.<sup>20</sup> Dalam hukum perdata kesepakatan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan (perjanjian yang disetujui oleh para pihak) mempunyai daya ikat yang kedudukannya sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>21</sup>

Maka dapat diartikan bahwa akad dan perjanjian memiliki pengertian yang sama yaitu perjanjian merupakan sebutan dalam hukum positif Indonesia sedangkan akad ada dalam sebutan hukum syariah. Tetapi untuk arti kedua kata tersebut mengandung arti sama yaitu adanya ikatan ataupun mengikat.

Akad atau perjanjian terbentuk karena adanya unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu<sup>22</sup> :

1. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul al- 'aqd*)

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 44

<sup>20</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2014), hlm. 338

<sup>21</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 342

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm, 196.

3. Objek akad (*mahallul al-'aqd*)

4. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*)

*Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, dan bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka saksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral<sup>23</sup>. Janji atau *wa'ad* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fatwa ini<sup>24</sup>.

Menurut pengertian Bahasa *sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya atau tukar menukar uang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money change*. Menurut istilah syara' *sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.

Dasar Hukum *sharf* :

Dalam kajian Fikih Muamalat, jual beli mata uang (*Sharf*) termasuk ke dalam bab jual beli yang didasarkan pada firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah(2) : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

<sup>23</sup>Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm, 65.

<sup>24</sup>Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam transaksi keuangan dan Bisnis Syariah. <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/>. (Diakses pada 23 Oktober 2017).

رَّبِّهِۦ فَانْتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>25</sup>.”

Syarat-syarat Sharf :

Secara umum jual beli mata uang (Sharf) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Tunai (*Al-Taqabudh*)

Syarat tunai yang dimaksud adalah transaksi dilakukan dan diselesaikan pada tempat kontrak sebelum berpisah antara kedua belah pihak. Dalam artian bahwa nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai, baik oleh penjual maupun pembeli sebelum keduanya berpisah.

---

<sup>25</sup> Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Departemen Agama RI), hlm. 43

## 2. Jumlahnya Sama (*Al-Tamatsul*)

Jumlah yang sama dipersyaratkan dalam transaksi *sharf*, jika jenis mata uangnya sama, seperti jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak, maka jumlahnya harus sama, yakni sama dalam kualitas dan kuantitasnya walaupun bentuknya berbeda.

## 3. Tidak boleh ada *khiyar syarat* dalam transaksi

*Sharf* tidak boleh dilakukan *Khiyar Syarat* antara kedua belah pihak dan salah satu pihak, karena *khiyar syarat* bertentangan dengan syarat tunai (*Al-Taqabudh*). Dalam akad *Sharf*, ketika akad telah selesai, maka kedua belah pihak memiliki hak sempurna atas nilai uang yang dipertukarkan.

## 4. Tidak Boleh Ditangguhkan

Dalam transaksi *sharf* kedua belah pihak dan salah satu pihak yang bertransaksi tidak boleh menangguhkan penyerahan uang untuk jangka waktu tertentu, karena uang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik sempurna masing masing pihak sebelum mereka berpisah, karena penangguhan mengakibatkan memperlambat kepemilikan sempurna terhadap uang, hal tersebut bertentangan dengan syarat tunai (*Al-Taqabudh*).

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْ لَدَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Acep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: PT Raja Persada, 2006), 130.



## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk menjawab terhadap masalah yang ada pada rumusan masalah, maka dalam penulisan ini haruslah melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu hukum adat dan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Adapun alasan penggunaan metode ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu untuk dapat mengungkapkan menganalisis, dan memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penggunaan metode pendekatan yuridis empiris ini dituntut untuk dapat melakukan penelitian baik terhadap masyarakat sebagai konsumen, PT. Jasamarga sebagai pelaksana kebijakan penerapan pembayaran nontunai di jalan tol. Selanjutnya diadakan pengkhususan terhadap objek penelitian yang ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah dalam penerapan atau

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30

pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, untuk kemudian dianalisis lebih jauh agar dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil dari proses adanya sebuah penelitian yang telah dilakukan.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa jenis data yang bersifat kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah diterapkan.<sup>28</sup>

Jenis data didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

## **3. Sumber Data**

Sumber data ini yang dijadikan rujukan atau pedoman dalam pengambilan untuk informasi dan data-data yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variable yang diteliti<sup>29</sup>. Sumber data penelitian

---

<sup>28</sup>Cik Hasan Bisri, *Peraturan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 58

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), hlm. 22

ini didapat dari keterangan dan data yang diperoleh dari staf pengelola PT. Jasamarga Indonesia cabang Bandung.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis dan data-data lainnya yang dapat memperkaya data primer<sup>30</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, kajian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendeskripsikan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis.
- b. Studi kepustakaan adalah menelaah terhadap dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

---

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 22

## 5. Analisa Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian<sup>31</sup>. Setelah dilakukan pengumpulan data menggunakan dua teknik yaitu wawancara, dan studi kepustakaan kemudian penulis melakukan analisis data dari hasil teknik pengumpulan data tersebut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh, yaitu:

- a. Meneliti dan memahami seluruh data yang sudah terkumpul terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.
- b. Mengklarifikasi data yang sudah didapatkan, dengan mempertimbangkan dari data primer dan data sekunder.
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- d. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>31</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 246

